



**Mengamalkan Kasih di Tahun Politik 2024:
Refleksi Teologis 1 Korintus 13 bagi Pelayanan Hamba Tuhan**

Angelista Felmalino Datuan Rongre¹

Febrianto Pangrelli Gomer^{2*)}

Zhalas Rainhard Mande³

Institut Agama Kristen Negeri Toraja

**)Email Correspondence: febriantopangrelli14@gmail.com*

ABSTRAK

Latar Belakang: Polaritas politik di Indonesia menimbulkan kebutuhan akan nilai-nilai yang dapat menyatukan masyarakat. 1 Korintus 13 menawarkan perspektif kasih yang dapat menjadi dasar dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai kasih dalam 1 Korintus 13 dapat diintegrasikan dalam praktik politik untuk mengurangi polarisasi dan meningkatkan kualitas demokrasi. Metode Penelitian menggunakan analisis kualitatif teks 1 Korintus 13 dan studi pustaka terkait, penelitian ini mengevaluasi aplikasi nilai-nilai kasih dalam konteks politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai kasih yang diuraikan dalam 1 Korintus 13 memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks politik Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2024. Analisis mendalam terhadap teks ini menunjukkan bahwa kasih, yang mencakup kesabaran, kemurahan hati, dan kebenaran, dapat menjadi dasar untuk kampanye politik yang lebih etis dan konstruktif. Penerapan nilai-nilai ini dapat mengurangi ketegangan politik, mempromosikan dialog yang konstruktif, dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan membangun demokrasi yang lebih kuat. Dengan demikian, integrasi nilai kasih dalam praktik politik dapat menjadi kunci untuk mengatasi polarisasi dan memperkuat kesatuan nasional di Indonesia.

Kata Kunci:

nilai kasih, 1 Korintus 13, politik Indonesia, polaritas, demokrasi.

ABSTRACT

Background: The political polarity in Indonesia raises the need for values that can unite society. 1 Corinthians 13 offers a perspective of love that can be grounded in politics. This study aims to explore how the values of love in 1 Corinthians 13 can be integrated into political

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 18/12/2023

Direvisi: 29/8/2024

Disetujui: 29/8/2024

Dipublikasi: 31/8/2024

practice to reduce polarization and improve the quality of democracy. Research Methods Using qualitative analysis of the text of 1 Corinthians 13 and related literature studies, this study evaluates the application of love values in the Indonesian political context. The results show that this study confirms that the values of love described in 1 Corinthians 13 have significant relevance in the Indonesian political context, especially ahead of the 2024 elections. An in-depth analysis of this text suggests that love, which includes patience, generosity, and truth, can be the basis for more ethical and constructive political campaigns. The implementation of these values can reduce political tensions, promote constructive dialogue, and create more inclusive and equitable policies, which in turn can improve the quality of public services and build stronger democracies. Thus, the integration of the value of love in political practice can be the key to overcoming polarization and strengthening national unity in Indonesia.

Keywords:

the value of love, 1 Corinthians 13, Indonesian politics, polarity, democracy.

PENDAHULUAN

Pemilu 2024 di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan politik. Rencananya, pada 14 Februari 2024, akan dilaksanakan Pemilu Serentak yang mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI. Selain itu, Pilkada juga akan diselenggarakan di seluruh daerah pada 27 November 2024. Dalam pemilu ini, 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berpartisipasi. Meskipun penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dihadapi tantangan, hingga saat ini, tahapan pelaksanaannya berjalan lancar. Pemerintah dan penyelenggara pemilu berupaya mengatasi masalah teknis persiapan, meningkatkan partisipasi pemilih, menegakkan transparansi, menerapkan tata kelola pemilu yang akuntabel, dan mengelola masa kampanye dengan baik.¹ Pentingnya pemilu ini sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa diakui, dengan harapan mampu melahirkan pemimpin sesuai dengan aspirasi rakyat. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjalankan kampanye yang sehat, berkualitas, dan berfokus pada politik ide dan gagasan, bukan politik identitas. Masyarakat juga diingatkan untuk menjadi selektif dalam menghadapi isu-isu yang muncul menjelang pemilu.²

Pengamatan terhadap dinamika politik saat ini memang menunjukkan adanya ketegangan dan ketidaksetujuan yang sering kali mendominasi diskursus politik. Retorika yang keras, serangan pribadi, dan tindakan merendahkan lawan politik telah menjadi pola yang umum, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang kurang mendukung untuk dialog yang konstruktif dan kerjasama yang produktif. Hal ini diperparah dengan kurangnya fungsi partai politik sebagai agen pendidikan politik, yang seharusnya mampu

¹Mathias Jebaru Adon Yohanes Alfrid Aliano, "Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu ' 2024 ' di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault," *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2024): 474.

²Yohanes Alfrid Aliano, "Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu ' 2024 ' di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault."

menciptakan iklim yang kondusif dalam pentas politik dan memberikan pencerahan politik kepada masyarakat.³ Ketegangan ini tidak hanya terjadi di ranah nyata, tetapi juga di dunia maya, di mana ekspresi politik warga yang disalurkan melalui media sosial menimbulkan ketegangan tersendiri yang bersifat horisontal, melibatkan masyarakat kelas menengah yang melek internet dan aktif secara online.

Keterlibatan netizen dalam proses demokrasi dan kampanye politik melalui media sosial telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam politik, dengan menggunakan teknologi digital sebagai "alat" interaktif untuk memproduksi dan mengonsumsi informasi politik. Penting bagi partai politik dan para pelaku politik untuk memahami bahwa pembangunan politik seharusnya dibarengi dengan praktik-praktik demokrasi yang sehat, di mana dialog dan kerjasama menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama. Kultur demokrasi yang ideal bukanlah kepercayaan yang membuta atau penolakan yang sifatnya memusuhi, tetapi bersifat ingin tahu, skeptis, dan menghindari sikap sinisme. Dengan demikian, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat dan menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan konstruktif dalam arena politik.⁴

Pentingnya membawa nilai-nilai kasih, toleransi, dan penghargaan terhadap martabat manusia ke dalam politik dapat dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai yang diungkapkan dalam 1 Korintus 13, yang menggambarkan esensi kasih. Dalam konteks ini, nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi panduan moral bagi individu dalam kehidupan pribadi mereka, tetapi juga bagi para pemimpin politik yang bertanggung jawab dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Seperti yang diungkapkan dalam sumber-sumber, agama harus menjadi rahmat bagi semua, tidak hanya bagi pemeluknya tetapi juga bagi bangsa dan semesta, yang mencakup aspek politik dan sosial. Martabat manusia, yang diberikan oleh Sang Pencipta, harus dihormati dan tidak boleh dipakai semata-mata sebagai sarana untuk tujuan lain, termasuk tujuan politik. Oleh karena itu, nilai-nilai kasih dan penghargaan terhadap martabat manusia harus menjadi fondasi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik, untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, demokratis, dan partisipatif.⁵

Penerapan prinsip kasih dalam kampanye politik memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang diharapkan dari para calon wakil rakyat. Kampanye yang berfokus pada solusi dan kerjasama, bukan pada perpecahan dan konflik, dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih produktif dan harmonis. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti kasih, toleransi, dan penghargaan terhadap martabat manusia, para calon dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat luas. Kasih, sebagai esensi yang digambarkan dalam 1 Korintus 13, menekankan pentingnya kesabaran, kebaikan, dan tidak bersifat iri atau sombong. Dalam konteks politik, hal ini berarti bahwa kampanye harus dilakukan dengan menghormati pandangan yang berbeda, menghindari fitnah, dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sebaliknya, kampanye harus diarahkan untuk membangun dialog yang konstruktif, mencari titik temu, dan mengembangkan solusi yang inklusif.⁶

³Muna Yastuti, "Netizen Dalam Kampanye Pilpres RI 2014," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 16.

⁴Yastuti, "NETIZEN DALAM KAMPANYE PILPRES RI 2014."

⁵J nathanael g. sumaktoyo mery Kolimon Taufiq Pasiak Alissa Wahid Franz magnis-suseno dan Ahmad Syafi'i Mufid Maman Imanulhaq rosalia Sciortino, *Agama, keterbukaan dan demokrasi* (Jakarta: pusat studi Agama dan demokrasi (pusAd) Yayasan paramadina, 2015), 33.

⁶Franz magnis-suseno dan Sciortino, *Agama, keterbukaan dan demokrasi*.

Kampanye yang berbasis pada prinsip kasih juga akan lebih mungkin untuk menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, karena menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Ini menciptakan kesempatan bagi para calon untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas, yang merupakan aset penting dalam politik. Selain itu, kampanye yang positif dan berorientasi pada kasih dapat mengurangi polarisasi politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Ketika para calon menunjukkan bahwa mereka bersedia bekerja sama dan mendengarkan semua suara, bukan hanya suara pendukung mereka, ini membantu memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat.

Menghindari polarisasi masyarakat dan menciptakan kesatuan di tengah perbedaan pandangan politik merupakan tantangan yang signifikan dalam pemilu 2024. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Syarwi, Pangi⁷ pada pemilu presiden 2019 di Indonesia, terdapat bukti bahwa polarisasi isu dan politik identitas telah menyebabkan keterbelahan yang mendalam di masyarakat. Dalam teori kepemilikan isu, partai politik perlu mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengkomunikasikan kompetensi mereka dalam menangani isu-isu penting tanpa menciptakan polarisasi ideologi yang lebih lanjut. Pemilih cenderung memilih berdasarkan ideologi dan isu yang diangkat oleh kandidat, sehingga penting bagi partai politik untuk mengidentifikasi dan mengelola isu-isu yang dapat menyatukan pemilih dari berbagai latar belakang.

Pemilu 2024 memberikan kesempatan untuk menerapkan pelajaran dari pemilu sebelumnya dengan mengembangkan kampanye yang mengutamakan narasi programatik dan menghindari bahaya polarisasi isu dalam politik identitas. Dengan fokus pada kesatuan dan dialog yang konstruktif, pemilu 2024 dapat menjadi ajang untuk memperkuat demokrasi dan kesatuan nasional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis.⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami pemahaman terhadap nilai-nilai teologis yang dapat diaplikasikan dalam pelayanan hamba Tuhan, terutama dengan merujuk pada 1 Korintus 13. Proses penelitian akan melibatkan perbandingan isi Kitab dengan studi pustaka, diikuti oleh analisis mendalam. Pertama-tama, sebagai sumber utama data, kitab suci, khususnya 1 Korintus 13, akan dianalisis secara rinci. Pengumpulan data primer ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks sejarah, budaya, dan linguistik dari pasal tersebut.

Analisis eksplisit terhadap teks ini akan memberikan landasan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kasih yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Untuk memberikan konteks lebih luas dan mendalam, penelitian ini akan mengeksplorasi literatur teologis terkait melalui studi pustaka.⁹ Analisis data sekunder ini melibatkan kajian terhadap karya-karya teologis, tafsiran Alkitab, dan literatur teologis lainnya yang mengupas konsep kasih dan pelayanan dalam perspektif teologis. Perbandingan antara isi Kitab dan temuan studi pustaka akan memungkinkan penemuan kesamaan, perbedaan, dan potensi implikasi teologis. Proses analisis akan melibatkan metode komparatif yang mendetail.¹⁰ Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi kesesuaian antara ajaran 1 Korintus 13 dengan temuan dalam studi pustaka, serta menyoroti relevansi dan

⁷Pangi Syarwi, "Polarisasi Isu , Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019," *Jurnal Communitarian* 4, no. 1 (2022): 591.

⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), 7.

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 291.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 20.

aplikabilitasnya dalam konteks pelayanan hamba Tuhan di tengah tantangan politik pada tahun 2024. Hasil analisis akan ditarik ke dalam kesimpulan teologis yang merangkum esensi ajaran 1 Korintus 13 dan menerapkannya dalam konteks pelayanan hamba Tuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Politik dalam Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, Indonesia menghadapi tantangan politik yang kompleks, terutama terkait dengan politik identitas yang dapat mempengaruhi dinamika pemilihan. Salah satu tantangan utama adalah peran teknologi, internet, dan media sosial yang menjadi wadah penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang salah. Media sosial, dengan kecepatan dan jangkauannya yang luas, dapat dengan mudah menyulut emosi masyarakat, yang berpotensi mempengaruhi keputusan pemilih jika mereka tidak cermat dalam menemukan informasi yang berkualitas. Tantangan ini diperparah oleh kesulitan dalam membedakan antara fakta dan opini, yang sering kali bercampur dalam diskusi politik online.¹¹

Selain itu, tantangan kaderisasi partai politik juga menjadi sorotan. Partai politik di Indonesia harus dapat memainkan fungsinya dengan baik, terutama dalam proses kaderisasi dan kandidasi. Penting bagi partai politik untuk merekrut kandidat berdasarkan nilai kebangsaan, bukan hanya pada identitas sempit yang dapat memicu polarisasi. Penguatan kelembagaan partai politik menjadi kunci dalam menciptakan kandidat yang berkualitas dan mampu mewakili kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya kelompok tertentu. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang lebih inklusif dan mewakili keberagaman masyarakat Indonesia.¹²

Upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam mengatasi tantangan politik menjelang Pemilu 2024 di Indonesia telah difokuskan pada beberapa aspek kunci. Pertama, pendidikan politik dianggap sebagai alat penting untuk mengatasi politik identitas yang destruktif. Pendidikan ini ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang proses demokrasi dan pentingnya memilih berdasarkan isu dan kebijakan, bukan identitas sempit. Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), bekerja sama dengan partai politik, masyarakat sipil, dan media massa untuk menyediakan informasi yang akurat dan membangun kesadaran politik di kalangan pemilih. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar dan damai.¹³

Selain itu, penguatan kelembagaan partai politik juga menjadi fokus utama. Partai politik didorong untuk memainkan peran mereka dalam proses kaderisasi dan kandidasi dengan merekrut kandidat berdasarkan nilai kebangsaan dan prinsip demokrasi yang bermartabat, yang sejalan dengan Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Pemerintah juga berupaya untuk mengurangi politik identitas destruktif dengan menekankan pentingnya prinsip mayoritas yang bermartabat, di mana kehendak mayoritas harus dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan minoritas dan keutuhan nasional.

Dinamika Politik dan Ketegangan

Menjelang Pemilu 2024, dinamika politik di Indonesia menunjukkan peningkatan ketegangan dan ketidaksetujuan yang tercermin dari berbagai faktor. Kondisi sosial politik

¹¹Marsa Maya Arjuna Askana Fikriana, "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024," *Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 01 (2024): 18.

¹²Askana Fikriana, "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024."

¹³Ibid.

domestik di Indonesia saat ini diwarnai oleh berbagai permasalahan yang belum terpecahkan, menyebabkan stagnasi politik yang ditandai dengan kurang efektifnya kebijakan dan persepsi bahwa penguasa tidak mampu memenuhi kehendak rakyat. Kualitas demokrasi yang rendah, dengan lemahnya *check and balances* dari berbagai institusi, juga berkontribusi pada situasi ini. Kontestasi politik yang memanaskan terlihat dari hasil survei elektabilitas kandidat calon presiden, yang menempatkan Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo sebagai tiga nama utama yang akan bersaing dalam pemilihan. Ketegangan ini diperparah oleh penggunaan populisme sebagai strategi politik, yang telah menjadi ciri khas dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Populisme ini sering kali menggarisbawahi kelemahan lawan politik dan meningkatkan pesimisme rakyat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perpecahan dan eksklusivitas di masyarakat.¹⁴

Pemilu 2024 dipandang sebagai momen krusial yang akan menentukan arah perpolitikan Indonesia ke depan, apakah akan terus didominasi oleh strategi populisme dan *branding* politik dengan isu agama dan suku, atau tidak. Dengan adanya potensi kekacauan massal, perpecahan yang semakin dalam, dan stagnasi ekonomi jika permasalahan ini tidak segera ditangani, tingkat kepercayaan serta dukungan masyarakat sipil terhadap pemerintahan yang berkuasa bisa menurun.

Dampak dari retorika keras, serangan pribadi, dan tindakan merendahkan lawan politik terhadap lingkungan politik dapat sangat merusak. *Pertama*, penggunaan retorika yang agresif dan serangan pribadi dapat menciptakan polarisasi yang tajam dalam masyarakat, mengurangi kemungkinan dialog konstruktif dan menggantikannya dengan konflik yang didasarkan pada emosi dan loyalitas partai, bukan pada pertimbangan rasional atau kebijakan substantif. *Kedua*, tindakan merendahkan lawan politik menurunkan standar dan kualitas debat publik, mengalihkan fokus dari isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan warga negara menjadi skandal, fitnah, dan drama pribadi yang tidak relevan dengan kebijakan publik. *Ketiga*, serangan pribadi dan retorika yang merendahkan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan proses demokrasi itu sendiri, menimbulkan sinisme dan apatisisme di kalangan pemilih, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi pemilih dan legitimasi pemerintah yang terpilih. *Keempat*, retorika yang memecah belah dan serangan pribadi juga dapat mengancam demokrasi dengan mengurangi kemampuan untuk mencapai kompromi dan konsensus, yang merupakan kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara. Akibatnya, lingkungan politik menjadi kurang kondusif untuk pembangunan demokrasi yang sehat dan efektif.¹⁵

Peran Media Sosial dan Netizen

Dalam era revolusi industri 4.0, media sosial telah menjadi unsur penting yang mendukung berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks politik. Generasi muda, yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z, merupakan pengguna internet terbanyak dan cenderung menggunakan media sosial untuk mempengaruhi dan berpartisipasi dalam politik. Media sosial memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan diri, berinteraksi, bekerja sama, dan berkomunikasi, membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam konteks politik, media sosial berfungsi sebagai platform untuk pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*), dan kerjasama (*cooperation*).¹⁶

¹⁴Bachtiar Nur Budiman et al., "Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal POLGOV* 3, no. 1 (2021): 212.

¹⁵Budiman et al., "Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia."

¹⁶Wa Ode Mudiani, "Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Kampanye Pada Pemilu 2024," *Journal on Education* 06, no. 01 (2024): 3273.

Pelajar dan pemilih pemula juga tidak terlepas dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam mencari informasi dan membentuk preferensi politik. Partai politik dan mesin politiknya menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye yang efektif dan murah, yang dapat menjangkau banyak pemilih dalam waktu singkat. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa suara pemilih pemula sangat potensial untuk meningkatkan elektabilitas calon dalam pemilihan umum. Media sosial telah berkembang menjadi berbagai bentuk, seperti majalah digital, forum internet, blog, jejaring sosial, dan lain-lain, dengan masing-masing memiliki kelebihan tersendiri dalam menarik pengguna. Media sosial yang populer di kalangan remaja termasuk *Facebook*, *WhatsApp*, *YouTube*, *LINE*, *Twitter*, dan lainnya.

Keterlibatan netizen dalam proses demokrasi dan kampanye politik melalui media sosial memiliki dampak yang signifikan. Media sosial telah menjadi alat yang efektif bagi pemilih pemula, khususnya remaja dan orang tua, untuk mendapatkan informasi politik dan berpartisipasi dalam kampanye. Dengan kemudahan akses dan penggunaan yang luas di kalangan masyarakat, platform seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp*, dan *YouTube* menjadi sarana penting dalam menyebarkan informasi kampanye. Mayoritas remaja menganggap penggunaan media sosial dalam kampanye politik sangat efektif. Media sosial tidak hanya memudahkan penyebaran informasi, tetapi juga memungkinkan interaksi langsung antara calon politik dan pemilih, sehingga meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran demokrasi di kalangan netizen. Selain itu, platform seperti *YouTube* juga telah terbukti efektif dalam promosi, seperti yang terlihat dalam kampanye yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur. Dengan demikian, media sosial telah memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik modern, memfasilitasi komunikasi politik yang lebih terbuka dan inklusif.¹⁷

Penerapan Nilai Kasih dalam Kebijakan Politik

Dalam konteks politik, nilai-nilai kasih, toleransi, dan penghargaan merupakan fondasi penting yang harus dijunjung tinggi oleh para pelaku politik, termasuk politisi Kristen. Kasih, sebagai inti dari ajaran Kristiani, harus menjadi motivasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan politik yang diambil, sehingga kebijakan tersebut berorientasi pada kebaikan bersama dan kesejahteraan rakyat.¹⁸ Toleransi diperlukan untuk menghargai dan mengakui keberagaman yang ada dalam masyarakat, memastikan bahwa setiap keputusan politik tidak memihak atau mendiskriminasi kelompok tertentu, dan bahwa keberpihakan kepada yang lemah tidak dilandasi oleh sentimen primordial. Penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman harus tercermin dalam sikap dan kebijakan politik yang adil dan tidak berat sebelah. Politisi Kristen dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang positif, menunjukkan keteladanan dalam perilaku, dan menjauhi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, politik menjadi wadah untuk mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah, seperti keadilan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

Selain itu, politik yang alkitabiah mengajarkan pentingnya bersikap jujur dan memiliki integritas, serta berani menanggung risiko demi memegang teguh prinsip kebenaran. Dengan demikian, politik tidak hanya dianggap sebagai arena kekuasaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk melayani dan menghadirkan kasih serta penghargaan kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan tertindas.

¹⁷Mudiani, "Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Kampanye Pada Pemilu 2024."

¹⁸Ferdinan Samuel Manafe, "Sikap Kristen Dalam Arena Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. April (2017): 1.

Implementasi nilai-nilai kasih, toleransi, dan penghargaan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik dapat dianalisis melalui beberapa aspek:¹⁹

Kasih sebagai Motivasi Kebijakan: Kasih harus menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan, di mana kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama menjadi prioritas utama. Kebijakan yang dibuat harus mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan dan hak-hak semua warga negara, tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa kebijakan harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperkuat solidaritas sosial.

Toleransi dalam Keberagaman: Toleransi mengharuskan pembuat kebijakan untuk mengakui dan menghormati keberagaman yang ada dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa kebijakan harus inklusif dan tidak boleh memarginalkan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan agama, etnis, gender, atau latar belakang sosial-ekonomi. Kebijakan harus dirancang untuk mempromosikan harmoni sosial dan mencegah konflik.

Penghargaan dalam Proses Politik: Penghargaan dalam politik berarti menghargai pendapat dan hak-hak politik dari semua pihak, termasuk oposisi dan kelompok minoritas. Dalam proses pembuatan kebijakan, harus ada ruang untuk dialog dan diskusi yang konstruktif, di mana semua suara didengar dan dipertimbangkan. Penghargaan juga berarti transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan akuntabilitas dari para pembuat kebijakan.

Refleksi Teologis 1 Korintus 13

Konteks Teologis 1 Korintus 13

Paulus menulis surat ini untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh jemaat di Korintus, termasuk perselisihan, kekacauan dalam ibadah, dan penyalahgunaan karunia-karunia rohani. Dalam konteks ini, 1 Korintus 13 sering disebut sebagai "Himne Kasih" karena Paulus menggambarkan kasih sebagai nilai tertinggi yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Paulus memulai bab 13 dengan menyatakan bahwa bahkan jika seseorang memiliki karunia berbahasa roh atau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang misteri-misteri ilahi, tetapi tidak memiliki kasih, maka semua itu tidak ada artinya. Ia menekankan bahwa kasih adalah lebih penting daripada karunia-karunia rohani yang spektakuler, seperti kemampuan untuk bernubuat, memahami misteri, memiliki pengetahuan yang luas, atau bahkan iman yang dapat memindahkan gunung.²⁰

Paulus kemudian mendefinisikan kasih dengan serangkaian pernyataan positif dan negatif, menggambarkan kasih sebagai sabar, baik hati, tidak iri, tidak sombong, tidak kasar, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih juga tidak bersukacita dalam ketidakadilan, tetapi bersukacita dalam kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu, dan tahan dalam segala sesuatu. Paulus juga menekankan bahwa kasih tidak pernah gagal, berbeda dengan karunia-karunia rohani yang akan berakhir. Nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap, karena pengetahuan dan nubuat kita sekarang hanya sebagian dan tidak sempurna. Namun, ketika yang sempurna datang, yang Yahudi, memberi kepada orang miskin adalah salah satu dari tiga pilar utama agama, bersama dengan doa dan puasa). Namun, Paulus menegaskan bahwa bahkan tindakan yang sangat dermawan ini tidak memiliki nilai apa-apa di hadapan Allah jika dilakukan tanpa kasih.

¹⁹Manafe, "SIKAP KRISTEN DALAM ARENA POLITIK."

²⁰Dyulius Thomas Bilo, "KARAKTERISTIK KASIH KRISTIANI MENURUT 1 KORINTUS 13," *PHRONESIS: Jurnal Teologi dan Misi* 1, no. 1 (2018): 1.

Tindakan kedua yang disebutkan oleh Paulus adalah "menyerahkan tubuhku supaya dibakar" (*paradōsō to sōma hina kauthēsomai*). Ini adalah tindakan pengorbanan diri yang ekstrem, yang bisa diartikan sebagai martir atau pengorbanan diri untuk tujuan yang mulia. Namun, Paulus menegaskan bahwa bahkan pengorbanan diri yang paling ekstrem sekalipun tidak berarti apa-apa tanpa kasih. Dalam konteks teologis, Paulus menunjukkan bahwa kasih adalah esensi dari hukum dan para nabi, dan merupakan inti dari ajaran Yesus Kristus tentang bagaimana kita harus hidup dan berinteraksi dengan sesama. Kasih adalah prinsip yang harus mengatur semua tindakan kita, dan tanpa kasih, semua yang kita lakukan tidak akan berarti di hadapan Allah. Kasih yang dijelaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 adalah kasih yang tidak egois, yang mencari kebaikan orang lain daripada kebaikan diri sendiri.²¹

Ini adalah kasih yang tidak hanya diucapkan dengan kata-kata tetapi juga ditunjukkan melalui tindakan yang tulus dan pengorbanan diri. Kasih ini adalah kasih yang abadi, yang akan bertahan selamanya, bahkan ketika karunia-karunia rohani yang lain telah berlalu. Dalam ajaran Kristen, kasih dianggap sebagai nilai fundamental yang melampaui semua karunia rohani dan tindakan lainnya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 menekankan bahwa kasih adalah unsur utama dan dasar hidup seorang Kristen. Kasih ini bukan hanya sekadar emosi atau perasaan, tetapi merupakan prinsip dasar yang harus mendasari semua tindakan dan pelayanan orang Kristen, termasuk dalam penggunaan karunia-karunia rohani.

Paulus mendefinisikan kasih dengan sifat-sifat yang mencerminkan karakter Kristus, seperti kesabaran, kemurahan hati, dan kebenaran. Kasih *agape* yang dijelaskan oleh Paulus tidak memegahkan diri, tidak cemburu, tidak sombong, tidak pemaarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih ini juga tidak bersukacita dalam ketidakadilan, tetapi bersukacita dalam kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu, dan tahan dalam segala sesuatu. Lebih lanjut, Paulus menegaskan bahwa kasih tidak pernah gagal dan akan bertahan selamanya, berbeda dengan karunia-karunia rohani yang akan berakhir. Kasih adalah bukti kedewasaan dan perkembangan kerohanian seseorang, dan merupakan hal yang kekal dan sempurna. Kasih adalah kualitas yang harus melampaui semua karunia rohani dan tindakan-tindakan lain yang kita lakukan, dan tanpa kasih, semua yang kita lakukan tidak akan berarti di hadapan Allah.²²

Kasih dalam Kebijakan Politik

Penerapan prinsip-prinsip kasih dalam konteks kebijakan politik menekankan pentingnya kebijakan yang dibuat berdasarkan kepedulian terhadap kebutuhan dan hak-hak semua warga negara, tanpa diskriminasi. Kasih harus menjadi motivasi utama dalam pembuatan kebijakan, dengan kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama menjadi prioritas utama. Kebijakan yang dirancang dengan prinsip kasih bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, nilai-nilai kasih, toleransi, dan penghargaan harus menjadi fondasi penting yang dijunjung tinggi oleh para pelaku politik. Dalam setiap kebijakan dan tindakan politik yang diambil, harus ada orientasi pada kebaikan bersama dan kesejahteraan rakyat. Toleransi diperlukan untuk menghargai dan mengakui keberagaman dalam masyarakat, memastikan bahwa keputusan politik tidak memihak atau mendiskriminasi kelompok tertentu.

²¹Bilo, "KARAKTERISTIK KASIH KRISTIANI MENURUT 1 KORINTUS 13."

²²Ibid.

Penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman harus tercermin dalam sikap dan kebijakan politik yang adil dan tidak berat sebelah.²³

Dalam dunia politik, hubungan antara nilai-nilai kasih dan tujuan pelayanan masyarakat sangat erat. Nilai-nilai kasih, yang mencakup empati, kepedulian, dan keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain, menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dibuat dengan prinsip kasih akan memprioritaskan kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama, daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kasih sebagai motivasi dalam politik mendorong para pemimpin untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan adil, yang memperhatikan hak-hak dan kebutuhan semua warga negara, termasuk kelompok yang rentan dan marginal. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang lebih produktif dan harmonis, di mana kampanye dan kebijakan tidak berfokus pada perpecahan dan konflik, tetapi pada solusi dan kerjasama.

Selain itu, nilai-nilai kasih dalam politik menginspirasi para pemimpin untuk bertindak dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, yang merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pelayanan masyarakat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, nilai-nilai kasih tidak hanya menjadi panduan moral bagi individu, tetapi juga bagi para pemimpin politik yang bertanggung jawab dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kampanye dan kebijakan yang berbasis pada prinsip kasih juga cenderung menarik dukungan yang lebih luas dari masyarakat, karena menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Ini menciptakan kesempatan bagi para calon untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas.²⁴

Menjaga Etika dalam Kampanye Politik

Ajaran kasih memiliki kaitan yang erat dengan etika dalam kampanye politik. Kasih, yang sering diartikan sebagai kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan orang lain, mendorong perilaku yang etis dan bertanggung jawab dalam proses politik. Dalam konteks kampanye politik, ajaran kasih mengarahkan para kandidat dan tim kampanye mereka untuk bertindak dengan cara yang menghormati martabat dan hak-hak semua individu, termasuk lawan politik dan pemilih. Kampanye yang didasarkan pada prinsip kasih akan menghindari taktik yang menyesatkan, manipulatif, atau memecah belah. Sebaliknya, kampanye tersebut akan berfokus pada diskusi yang jujur dan terbuka mengenai isu-isu yang penting bagi masyarakat, serta menawarkan solusi yang konstruktif dan inklusif. Ajaran kasih juga menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran, yang merupakan aspek kunci dari etika dalam kampanye politik.²⁵

Selain itu, ajaran kasih memotivasi para politisi untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok, yang merupakan prinsip etis dasar dalam pelayanan publik. Dengan demikian, ajaran kasih tidak hanya membentuk dasar moral bagi individu tetapi juga menjadi panduan bagi perilaku etis dalam kampanye politik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Peran kasih dalam mencegah retorika yang merugikan dan tindakan tidak etis dalam politik sangat signifikan. Kasih, sebagai prinsip yang mengutamakan kepedulian

²³Cahya Supriatna, *MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGAN* (Bandung: Alfabeta, n.d.), 44.

²⁴Supriatna, *MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGAN*.

²⁵Yohanes Alfrid Aliano et al., "Analisis Kritis Etika Politik Kasih Tinjauan Fratelli Tutti 154 Perang Melawan Politik Individualisme," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6 (2023): 427.

dan kebaikan terhadap sesama, dapat mengarahkan para pelaku politik untuk menghindari penggunaan bahasa yang merendahkan atau menyerang pribadi lawan politik. Dengan mendasarkan tindakan dan ucapan pada kasih, politisi dan pendukungnya lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif dan menghormati pandangan yang berbeda, daripada terlibat dalam konflik dan perpecahan. Kasih juga mendorong transparansi dan kejujuran, yang merupakan aspek penting dari etika politik. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena kasih tidak membenarkan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, kasih dapat menjadi fondasi bagi pembuatan kebijakan yang adil dan tidak berat sebelah, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut berorientasi pada kebaikan bersama dan kesejahteraan rakyat.²⁶

Selain itu, kampanye yang didasarkan pada prinsip kasih cenderung lebih inklusif dan mengurangi polarisasi politik, karena menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Ini menciptakan lingkungan politik yang lebih produktif dan harmonis, di mana para calon dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas, yang merupakan aset penting dalam politik.

Keseimbangan Antara Ketegangan dan Kasih

Nilai kasih memiliki potensi yang besar untuk mengatasi ketegangan politik yang sering kali muncul akibat persaingan, perbedaan ideologi, dan kepentingan yang bertentangan. Kasih, yang diartikan sebagai kepedulian mendalam terhadap kesejahteraan orang lain, dapat menjadi motivasi utama dalam pembuatan kebijakan dan tindakan politik, sehingga kebijakan tersebut berorientasi pada kebaikan bersama dan kesejahteraan rakyat. Dengan mendasarkan tindakan politik pada kasih, para pelaku politik dapat mengedepankan dialog yang konstruktif, mencari titik temu, dan mengembangkan solusi yang inklusif, daripada terjebak dalam retorika yang memecah belah. Kasih mendorong politisi untuk menghormati pandangan yang berbeda dan menghindari fitnah, serta tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kasih juga memainkan peran penting dalam mengurangi polarisasi politik, karena kampanye yang berorientasi pada kasih menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga, menciptakan kesempatan bagi para calon untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri. Selain itu, nilai kasih dapat mencegah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena tidak membenarkan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, politik menjadi wadah untuk mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.²⁷

Penerapan kasih dalam politik dapat menjadi sarana yang ampuh untuk membangun dialog yang konstruktif dan kerjasama antar individu dan kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Kasih, yang diartikan sebagai kepedulian mendalam terhadap kesejahteraan orang lain, mendorong politisi dan pemangku kepentingan untuk mendekati perbedaan pendapat dengan sikap terbuka dan keinginan untuk memahami perspektif yang berbeda. Dengan kasih sebagai motivasi, kebijakan politik dapat diarahkan untuk mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan dan hak-hak semua warga negara, tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa kebijakan harus dirancang untuk mengurangi

²⁶Aliano et al., "Analisis Kritis Etika Politik Kasih Tinjauan Fratelli Tutti 154 Perang Melawan Politik Individualisme."

²⁷Sobali Suswandy et al., "Partisipasi Politik Anak Muda dalam Organisasi Aktivistis Online : Dampaknya pada Perubahan Sosial," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4 (2020): 1806.

kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperkuat solidaritas sosial. Kasih juga mendorong politisi untuk menghormati pandangan yang berbeda dan menghindari fitnah, serta tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.²⁸

Kampanye yang berbasis pada prinsip kasih akan lebih mungkin untuk menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, karena menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Ini menciptakan kesempatan bagi para calon untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas, yang merupakan aset penting dalam politik. Selain itu, kampanye yang positif dan berorientasi pada kasih dapat mengurangi polarisasi politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Politisi yang menerapkan nilai kasih dalam tindakan mereka menjadi agen perubahan yang positif, menunjukkan keteladanan dalam perilaku, dan menjauhi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Transformasi Masyarakat Melalui Kasih

Nilai-nilai kasih memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan demokratis. Kasih sebagai motivasi kebijakan mengharuskan kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama menjadi prioritas utama, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan dan hak-hak semua warga negara tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa kebijakan harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, politik tidak hanya dianggap sebagai arena kekuasaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk melayani dan menghadirkan kasih serta penghargaan kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan tertindas. Implementasi nilai-nilai kasih dalam politik menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana martabat manusia dihormati dan tidak dipakai semata-mata sebagai sarana untuk tujuan lain, termasuk tujuan politik.²⁹

Kasih memainkan peran krusial dalam menciptakan kesatuan di tengah perbedaan pandangan politik. Dalam konteks Pemilu 2024, kampanye yang berbasis pada prinsip kasih dapat menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Kampanye yang positif dan berorientasi pada kasih dapat mengurangi polarisasi politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti kasih, toleransi, dan penghargaan terhadap martabat manusia, para calon dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat luas, membangun dialog yang konstruktif, mencari titik temu, dan mengembangkan solusi yang inklusif.³⁰

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan nilai-nilai kasih, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 13 oleh Paulus, sangat penting dalam konteks politik Indonesia menjelang Pemilu 2024. Penelitian ini menyoroti bahwa nilai kasih yang mencakup kesabaran, kemurahan hati, kebenaran, dan tidak memegahkan diri dapat menjadi dasar untuk kampanye politik yang lebih etis dan konstruktif, yang pada

²⁸Suswandy et al., "Partisipasi Politik Anak Muda dalam Organisasi Aktivis Online : Dampaknya pada Perubahan Sosial."

²⁹Asih Rachmani Endang Sumiwi dan Joseph Christ Santo , Joko Sembodo, "Membangun sikap kerukunan sosial melalui kerukunan internal dalam jemaat: Refleksi teologis 1 Korintus 1:10-13," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 7, no. 2 (2021): 365.

³⁰Sumiwi dan , Joko Sembodo, "Membangun sikap kerukunan sosial melalui kerukunan internal dalam jemaat: Refleksi teologis 1 Korintus 1:10-13."

gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.

Dalam menghadapi tantangan polarisasi isu dan politik identitas, nilai-nilai kasih dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan politik, penguatan partai politik, dan penerapan nilai kasih dalam kebijakan politik untuk menciptakan lingkungan politik yang sehat dan demokratis.

Selain itu, penelitian ini mengakui peran penting teknologi, internet, dan media sosial dalam dinamika politik saat ini, serta pentingnya kaderisasi partai politik yang berbasis pada nilai kebangsaan. Implementasi nilai kasih dalam kebijakan politik diharapkan dapat membantu membangun masyarakat yang inklusif, di mana martabat manusia dihormati dan tidak dipakai semata-mata sebagai sarana untuk tujuan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliano, Yohanes Alfrid, Yeremia Anton, Julianus Welan, dan Stefanus Lau. "Analisis Kritis Etika Politik Kasih Tinjauan Fratelli Tutti 154 Perang Melawan Politik Individualisme." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6 (2023): 427–441.
- Askana Fikriana, Marsa Maya Arjuna. "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024." *Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 01 (2024): 18–23.
- Bilo, Dyulius Thomas. "KARAKTERISTIK KASIH KRISTIANI MENURUT 1 KORINTUS 13." *PHRONESIS: Jurnal Teologi dan Misi* 1, no. 1 (2018): 1–17.
- Budiman, Bachtiar Nur, Balilah Rizki Putriga, Bella Dewi Safitri, dan Vinona Julietta Imanuela. "Populisme : Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal POLGOV* 3, no. 1 (2021): 211–244.
- Franz magnis-suseno, sJ nathanael g. sumaktoyo mery Kolimon Taufiq Pasiak Alissa Wahid, dan Ahmad Syafi'i Mufid Maman Imanulhaq rosalia Sciortino. *Agama, keterbukaan dan demokrasi*. Jakarta: pusat studi Agama dan demokrasi (pusAd) Yayasan paramadina, 2015.
- Manafe, Ferdinan Samuel. "SIKAP KRISTEN DALAM ARENA POLITIK." *Missio Ecclesiae* 6, no. April (2017): 1–16.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2002.
- Mudiani, Wa Ode. "Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Kampaye Pada Pemilu 2024." *Journal on Education* 06, no. 01 (2024): 3273–3278.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumiwi, Asih Rachmani Endang, dan Joseph Christ Santo, Joko Sembodo. "Membangun sikap kerukunan sosial melalui kerukunan internal dalam jemaat: Refleksi teologis 1 Korintus 1:10-13." *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 7, no. 2 (2021): 364–371.
- Supriatna, Cahya. *MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGAN*. Bandug: Alfabeta, n.d.
- Suswandy, Sobali, Muhammad Firman, Juliati Juliati, dan Abdul Wahab. "Partisipasi Politik Anak Muda dalam Organisasi Aktivistis Online : Dampaknya pada Perubahan Sosial." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4 (2020): 1806–1812.
- Syarwi, Pangli. "Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019." *Jurnal Communitarian* 4, no. 1 (2022): 591–602.
- Yastuti, Muna. "NETIZEN DALAM KAMPANYE PILPRES RI 2014." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 16–25.

Yohanes Alfrid Aliano, Mathias Jebaru Adon. “Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu ‘ 2024 ’ di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2024): 474–485.